

Hubungan Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo Disinyalir Memanas Pasca-Mutasi 60 ASN



Ilustrasi. Subandi Bupati Sidoarjo dan Mimik Idayana Wakil Bupati Sidoarjo. Foto: suarasurabaya.net

Subandi Bupati Sidoarjo pada, Rabu (18/9/2025) kemarin, resmi memutasi sebanyak 60 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Dalam pelantikan di Pendopo Delta Wibawa itu, sejumlah pimpinan perangkat daerah disumpah, baik untuk menempati posisi baru maupun dikukuhkan dalam jabatan yang sebelumnya diemban sebagai pelaksana tugas (Plt).

Mereka terdiri dari 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan 49 Pejabat Administrator. Beberapa pejabat yang resmi menempati jabatan baru yakni Muhammad Ainur Rahman, yang sebelumnya menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, kini dilantik sebagai Kepala Bappeda Sidoarjo.

Sementara itu, Ahmad Misbahul Munir yang sebelumnya memimpin Dinas Sosial, bergeser menjadi Kepala BKD Sidoarjo.

Pergantian juga terjadi di sejumlah dinas lainnya. Kepala Dinas Perpustakaan, Ridho Prasetyo, kini menduduki jabatan sebagai Kepala DPMPTSP. Posisi lamanya digantikan oleh Rudi

Setiawan, yang sebelumnya menjabat Kepala DPMPTSP.

Subandi pada kesempatan kemarin menegaskan Mutasi, rotasi, maupun promosi adalah hal yang wajar dan mutlak dalam rangka pengembangan karier pegawai, sebagai bagian dari manajemen talenta.

“Tujuannya jelas, yakni menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, hal ini selaras dengan sistem dan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa penempatan jabatan harus dilakukan secara adil, objektif, profesional, dengan dasar kompetensi, integritas, dan kinerja, tanpa membedakan latar belakang apa pun”, ucapnya.

Subandi juga mengatakan kebijakan merotasi pejabat itu sudah mendapatkan izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Jadi dapat izin atau tidaknya itu dari BKN. Dari Jakarta ke regional terus ke daerah lagi dan diproses tim. Kita lakukan pelantikan setelah ada izin dari BKN,” kata Bupati Sidoarjo.

Meski demikian, pelantikan itu disinyalir membuat hubungan antara Subandi dengan Mimik Idayana Wakil Bupati Sidoarjo memanas.

Pasalnya, dalam pelantikan itu, Wakil Bupati (Wabup) tidak hadir meski sudah mendapat surat undangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

Wabup Sidoarjo sendiri pada kesempatan terpisah menilai pelantikan pejabat tersebut cacat prosedur karena tidak sesuai mekanisme yang seharusnya dijalankan Tim Penilai Kinerja (TPK).

“Sudah saya kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK tanggal 16 September 2025, tapi sampai pelantikan digelar tidak ada laporan sama sekali. Saya kecewa dengan TPK,” ujar Mimik yang juga pengarah TPK kepada awak media, Rabu.

Menurut Mimik, dirinya tidak pernah menerima laporan resmi mengenai pejabat yang akan dimutasi. Informasi justru ia peroleh dari awak media.

“Saya tidak tahu sama sekali siapa pejabat yang akan dimutasi. Tahunya malah dari rekan-rekan media,” ucapnya.

Ia menambahkan, masukan yang ia sampaikan dalam rapat TPK tidak diakomodasi. Bahkan, dirinya merasa hanya dijadikan formalitas untuk melegitimasi seolah-olah proses sudah sesuai aturan.

“Saya hanya dijadikan alat legitimasi bahwa prosesnya sudah benar, padahal faktanya tidak begitu. Kali ini saya sungguh kecewa dan tidak mau lagi ada toleransi,” tegasnya.

Selain mengkritisi mutasi, Mimik juga menyinggung persoalan lain yang belum ditindaklanjuti Bupati Subandi, yakni dugaan pelanggaran kewenangan oleh staf pribadi (spri) bupati.

Menurutnya, spri tersebut mengambil alih secara paksa tugas pengelolaan teknologi informasi di BKD Sidoarjo. “Jawaban investigasi belum ada, ternyata mutasi sudah dipaksakan

jalan," pungkas Mimik.

Respon Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Di sisi lain, terkait pelantikan tersebut, Basuki Ari Wicaksono Plt Kepala Kantor Regional (Kakanreg) II BKN menyatakan, dari segi manajemen tata negara, proses dan tahapan mutasi sudah dilengkapi.

Menurutnya, usulan dan izin mutasi pejabat Pemkab Sidoarjo itu juga sudah diajukan ke BKN Pusat dan disetujui. Hasilnya dikembalikan lagi ke daerah.

"Dan, setelah itu sudah menjadi kewenangan bupati untuk meng-SK-kan dan melantik," jelas Basuki Ari kepada media setelah pelantikan pejabat Pemkab Sidoarjo pada Rabu (17/9/2025).

Apakah tahapan itu telah sesuai aturan? Basuki Ari memastikan sudah semua. Tentang rincian, SK, kemudian tahapannya apa saja, nanti dilakukan satu pintu di BKD Sidoarjo.

"Yang jelas kami tidak akan memberikan izin jika tahapan-tahapan atau syarat-syaratnya itu tidak dilengkapi," jelas Basuki Ari.

Terkait mutasi berikutnya, ia menegaskan hal itu sepenuhnya kewenangan Bupati Sidoarjo sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). "Itu kewenangan bupati atau wali kota selaku PPK," tegas Basuki Ari. (bil/faz)



Lini Masa Keretakan Hubungan Subandi-Mimik



Ilustrasi. Subandi Bupati Sidoarjo dan Mimik Idayana Wakil Bupati Sidoarjo. Foto: suarasurabaya.net

Belum genap satu tahun memimpin Kabupaten Sidoarjo, hubungan antara Subandi Bupati Sidoarjo dengan Mimik Idayana Wakilnya kembali jadi sorotan. Dinamika keduanya kerap mencuat ke publik, bahkan memicu spekulasi soal keretakan di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Padahal, saat dilantik Prabowo Subianto Presiden RI bersama 961 kepala daerah lain pada 20 Februari 2025, duet Subandi–Mimik kompak menyatakan fokus pada penguatan ekonomi berbasis UMKM, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas layanan publik.

Namun, dalam perjalanan kepemimpinannya, hubungan duet Subandi-Mimik ternyata tak semulus yang diperkirakan.

Melansir sumber berbagai, berikut rincian kronologi dan *timeline* konflik dua pemimpin Kabupaten Sidoarjo tersebut:

20 Februari 2025: Subandi-Mimik Dilantik

Subandi dan Mimik Idayana resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo (Wabup) periode 2025–2030 oleh Prabowo Subianto Presiden. Keduanya menegaskan visi bersama: ekonomi UMKM, infrastruktur, layanan publik, lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

19 Maret 2025: Viral Video Pernyataan Subandi

Sebuah video pendek Subandi yang menyebut anggota DPR menghambur-hamburkan uang viral di media sosial pada Maret lalu. Dalam video tersebut, ia mengatakan "*Kene* (Bupati dan Wabup) *seng golek duwek*, DPR menghambur-hamburkan uang."

Alhasil, pernyataan ini pun menuai reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo yang kemudian menuntut Subandi mengklarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya.

Meski demikian, viral video pada bulan Maret itu, masih belum terindikasi menyebabkan keretakan hubungan antara Subandi dengan Mimik. Bahkan Bupati Sidoarjo dengan Wakilnya dalam beberapa kesempatan masih tampak kompak saat menghadiri acara.

10 Juni 2025: Desakan DPRD Sidoarjo

Enam fraksi DPRD Sidoarjo (Gerindra, PAN, PDI Perjuangan, PKB, PKS-PPP, dan NasDem-Demokrat) akhirnya secara resmi mendesak Bupati Subandi meminta maaf atas pernyataannya. Hal itu disampaikan para anggota legislatif dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (10/6/2025) lalu.

17 Juni 2025: Subandi Minta Maaf, Dewan Walk Out

Subandi Bupati Sidoarjo kemudian menyampaikan permintaan maaf dalam sidang paripurna, Selasa (17/6/2025). Namun, sejumlah anggota dewan pada kesempatan itu justru *walk out*.

Mereka menilai Subandi tidak secara spesifik menyebutkan klarifikasi permohonan maaf atas pernyataannya yang viral pada 19 Maret 2025 lalu itu.

19 Juni 2025: Mimik Dukung Sikap Politik Gerindra

Adapun penolakan permintaan maaf itu juga berasal dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo, yang dalam pilkada serentak mendukung duet Mimik-Subandi. Menariknya, Mimik yang notabene merupakan Ketua DPC Gerindra Sidoarjo sekaligus wakil Subandi, justru mendukung sikap politik partainya itu.

"Ibaratnya, kacang lupa kulitnya. Masyarakat tahu bahwa dia bisa menjadi bupati karena diusung partai kami, Gerindra. Sedangkan partai lain kan sebagai pelengkap. Ternyata tidak tahu diri, dan sama sekali tidak menghargai jerih payah kami," kata Mimik, pada 19 Juni lalu.

19 Juni 2025: Mimik Mengaku Jarang Dilibatkan

Lebih lanjut, pada kesempatan itu Mimik mengungkapkan selama ini dirinya sebagai Wabup tidak dihargai oleh Subandi Bupati. Dalam pengelolaan pemerintahan dirinya mengaku diabaikan, bahkan juga kerap tidak dilibatkan, termasuk dalam proses pengambil kebijakan.

Seperti pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) mengatur insentif petugas pajak atau Perbup mengatur pegawai P3K beberapa waktu lalu.

"Jangankan saya diminta pertimbangan, diajak ngomong saja tidak. Padahal Bupati dan Wakil Bupati itu merupakan kesatuan dalam pemerintahan," ujarnya.

"Jadi kesabaran saya sudah cukup. Saya tegasnya hubungan saya dengan Pak Bupati tidak baik-baik saja," tambahnya.

Dari pernyataan itulah, isu keretakan hubungan Subandi–Mimik mulai tercium awak media. Apalagi, kabar tidak harmonisnya Subandi dengan Mimik kala itu secara tidak langsung juga dibenarkan sejumlah partai politik pengusungnya di Pilkada Serentak 2024.

23 Juni 2025: Partai Pengusung Buka Suara

Salah satu partai yang turut berkomentar adalah Golkar Sidoarjo. Adam Rusydi Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo mengatakan, meski tengah berkonflik, pihaknya tetap berkomunikasi baik dengan Subandi maupun Mimik.

"Golkar menjaga komunikasi baik dengan Pak Subandi maupun Bu Mimik. Kami berharap konflik atau perbedaan yang terjadi bisa diselesaikan dengan tabayun dan komunikasi terbuka," kata Adam, Senin (23/6/2025) lalu kepada awak media.

Meski begitu, kata Adam, Golkar menegaskan tidak ingin ikut campur dalam dinamika internal antara Subandi dan Mimik. Sebaliknya, pihaknya lebih memilih kerja kongkret. "Golkar tidak mau sibuk gaduh. Kami lebih memilih kerja kongkret. Ini soal komitmen moral dan politik kepada rakyat," ujar Adam kala itu.

24 Juni 2025: Gerindra Jatim Berharap Fokus Kerja untuk Warga

Hal senada juga disampaikan Gerindra Jawa Timur (Jatim). Hidayat Wakil Ketua Gerindra Jatim meminta keduanya bisa bekerja maksimal untuk warga Sidoarjo.

"Kami harap keduanya bisa bekerja semaksimal mungkin untuk warga Sidoarjo," kata Hidayat, Selasa (24/6/2025) lalu.

25 Juni 2025: Mimik Bantah Keretakan dengan Subandi

Meski demikian, Mimik Idayana Rabu (25//6/2025) lalu, membantah kalau hubungannya dengan Subandi retak. Dia menegaskan bahwa hubungan kepemimpinannya dengan Bupati Sidoarjo itu dalam keadaan baik, sekaligus menepis rumor ketidakcocokan.

"*Hoax, seng retak iku sopo sih* (siapa sih yang retak). Media sendiri (yang menggoreng)," ujarnya dalam sebuah wawancara dengan awak media, Rabu (25//6/2025) lalu.

Lebih lanjut, Mimik menegaskan komitmennya bersama Subandi membangun Kabupaten Sidoarjo secara kolaboratif. "Saya bersama Pak Subandi sudah berkomitmen memajukan dan kesejahteraan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo," tambahnya.

Sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, Mimik juga menekankan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. "Tidak ada keretakan. Kami baik-baik saja. Love you Sidoarjo," ungkapnya sambil memperagakan simbol cinta dengan jarinya kepada awak media saat itu.

17 September 2025: Konflik Baru Pasca-rotasi Pejabat

Sempat mereda, konflik terbaru keduanya kembali mencuat usai Subandi merotasi 60 pejabat ASN dalam pelantikan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (17/9/2025).

Subandi menegaskan mutasi adalah hal wajar untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dan sudah mendapat izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Jadi dapat izin atau tidaknya itu dari BKN. Dari Jakarta ke regional terus ke daerah lagi dan diproses tim. Kita lakukan pelantikan setelah ada izin dari BKN," kata Bupati Sidoarjo.

Namun, Mimik yang notabene Wabup tidak hadir dalam pelantikan tersebut, meski sudah diundang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo.

17 September 2025: Mimik Kritik Pelantikan

Dalam pernyataan terpisah, ia mengkritik pelantikan itu sebagai "cacat prosedur". Mimik yang juga pengarah Tim Penilai Kinerja (TPK) mengaku tidak mendapat laporan.

"Sudah saya kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK tanggal 16 September 2025, tapi sampai pelantikan digelar tidak ada laporan sama sekali. Saya kecewa dengan TPK," ujar Mimik kepada awak media, Rabu (17/9/2025)

Mimik menambahkan, dirinya tidak tahu siapa saja pejabat yang dimutasi karena informasi justru diperoleh dari media. Ia merasa hanya dijadikan formalitas.

"Saya hanya dijadikan alat legitimasi bahwa prosesnya sudah benar, padahal faktanya tidak begitu. Kali ini saya sungguh kecewa dan tidak mau lagi ada toleransi."

Selain itu, Mimik menyinggung dugaan pelanggaran kewenangan staf pribadi (spri) Bupati Subandi yang mengambil alih urusan teknologi informasi di BKD. "Jawaban investigasi belum ada, ternyata mutasi sudah dipaksakan jalan," ujarnya.

Dengan serangkaian kejadian sejak Maret ini, terhitung dalam kurun waktu tujuh bulan sejak dilantik, duet Subandi–Mimik sudah dua kali diguncang isu ketidakharmonisan. (bil/ipg)



Nyala Matahari Kembar Sidoarjo Yang Membakar Rakyatnya



Ilustrasi. Foto: AI

Konflik antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana bukan lagi sekadar bisik-bisik politik. Tak butuh waktu lama sejak mereka dilantik 20 Februari 2025, sebulan kemudian benih friksi itu muncul.

Dimulai dari video yang viral berisi ucapan Bupati. "Kene (Bupati dan Wabup) seng nggolek duwik, DPR yang menghambur-hamburkan." ("Kami yang mencari uang, mereka yang menghambur-hamburkan"-Red). Itu membuka front konflik terbuka dengan DPRD Sidoarjo. Tuntutan agar Bupati meminta maaf muncul dari legislatif. Saat itu keretakan masih belum terlihat di depan publik

Sejak pertengahan Juni 2025, publik mulai melihat celah. Saat rapat paripurna di DPRD Sidoarjo, Bupati menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka. Namun Fraksi Partai Gerindra menolaknya. Mimik selaku Ketua DPC Partai Gerindra Jawa Timur mendukung sikap fraksinya di dewan. Meskipun sinyal friksi itu beberapa kali ditepis keduanya, namun publik membaca tanda-tanda yang lain.

Setelah itu, Mimik juga secara terbuka menyampaikan keluhannya: "Sejak awal saya merasa tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Wakil bupati seharusnya

bagian dari kerja tim, bukan sekadar pelengkap.” Subandi menjawab dengan nada tegas: “Kewenangan eksekutif itu ada di tangan bupati, bukan di wakil. Saya hanya menjalankan mandat undang-undang.”

Keretakan itu mencapai titik terang pada 17 September 2025 ketika Subandi merotasi 60 pejabat ASN. Subandi menyebut langkah itu “mutasi wajar untuk penyegaran birokrasi”, sementara Mimik menimpali: “Saya justru baru tahu dari media, masukan saya di tim penilai kinerja tidak pernah diakomodasi.” Dua peristiwa ini memperlihatkan satu hal: duet bupati–wabup di Sidoarjo berjalan tanpa harmoni.

Efeknya langsung terbaca dalam mesin birokrasi. Hingga 9 September 2025, serapan pengadaan baru 41,24 persen, hanya sekitar Rp950 miliar dari pagu Rp2,3 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm bahwa banyak program publik tersendat.

Program betonisasi di sembilan ruas jalan digembar-gemborkan sebagai solusi banjir dan macet, tapi dengan serapan rendah, progresnya ikut terseret. Pelelangan mundur, pengerjaan fisik belum maksimal, dan janji “rampung dalam tiga bulan” semakin berat dikejar.

Normalisasi sungai dari Kali Pelayaran sampai Porong Kanal memang terlihat rajin diberitakan di musim kemarau, tetapi justru di situlah masalahnya: hasil normalisasi belum teruji. Tanpa drainase yang terintegrasi dan tata kelola sampah yang berkelanjutan, genangan tetap menjadi ancaman begitu musim hujan tiba.

Ini bukan pertama kali friksi di pucuk menghambat pelayanan publik. Di Bojonegoro, 2021–2022, konflik terbuka antara Bupati Anna Mu’awanah dan Wabup Budi Irawanto bahkan sampai ke ranah hukum, dan DPRD kala itu mengakui dampaknya terhadap suasana kerja pemerintahan.

Di Tasikmalaya, 2025, Bupati Ade Sugianto melaporkan wakilnya ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen, dan KPPOD menilai disharmoni itu merusak stabilitas pemerintahan daerah. Polanya sama: perpecahan di atas menjalar ke bawah, memperlambat pembangunan yang seharusnya menyentuh warga.

Masyarakat Sidoarjo kini menghadapi risiko serupa. Jalan berlubang belum tuntas, sampah menumpuk, dan sungai menunggu waktu untuk kembali meluap di musim hujan. Hak publik atas layanan dasar: jalan yang aman, lingkungan bersih, drainase yang berfungsi, seakan jadi korban tarik-menarik kuasa.

Pertanyaannya sederhana: apakah warga harus menunggu kedua pemimpinnya akur dulu sebelum bisa merasakan layanan yang memang sudah menjadi hak mereka?

Friksi bupati–wabup bukan semata soal dua pribadi yang berseberangan, melainkan soal moral politik. Sejauh mana mereka mau menyingkirkan ego demi tanggung jawab kepada publik? Kalau tidak, pemerintahan akan terus berjalan setengah hati, dan rakyat lagi-lagi menjadi pihak yang paling dirugikan.

“Mereka sibuk saling menyilaukan, kita yang merasakan silapnya.”



Mimik Akan Laporkan Prosedur Mutasi ASN ke Kemendagri, Subandi: Sudah Sesuai Aturan



Ilustrasi. Subandi Bupati Sidoarjo dan Mimik Idayana Wakil Bupati Sidoarjo. Foto: suarasurabaya.net

Konflik di internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang melibatkan bupati dengan wakilnya, tampaknya masih belum juga mereda.

Terbaru, Mimik Idayana Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo berencana melapor prosedur rotasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (17/9/2025) pekan lalu, kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dia menjelaskan, dalam rotasi ASN pada Rabu (17/9/2025), sebelumnya telah disepakati bahwa pergeseran hanya untuk mengisi 31 jabatan yang kosong di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Namun menurutnya, dalam pelaksanaan, jumlahnya bertambah menjadi 61 orang. Wabup mengatakan penambahan itu tak pernah diberitahukan kepadanya selaku pengarah Tim Penilai Kerja (TPK).

"Saya tidak mengetahui prosesnya, bahkan saat pelantikan berlangsung. Karena itu, saya akan melaporkan masalah ini ke Kementerian Dalam Negeri agar sistem di Sidoarjo diluruskan kembali," tegasnya kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).

Mimik mengaku telah mengirim surat kepada bupati pada Selasa (16/9/2025), sehari sebelum pelantikan, untuk meminta klarifikasi terkait nama-nama ASN yang akan dimutasi.

Namun, surat itu tidak mendapat jawaban. Mimik melihat ada penilaian yang tidak objektif, karena ada ASN yang kinerjanya baik justru tidak masuk pelantikan atau malah dipindah. Ironisnya, kata Mimik, ketika dia minta laporan kinerja TPK tak dijawab, dan sampai proses pelantikan selesai tetap tidak dikasih jawaban.

Mutasi itu disebutnya melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ini bertujuan membangun ASN yang profesional, berintegritas, dan bebas KKN, serta fokus pada penguatan Sistem Merit, penataan tenaga honorer, peningkatan kesejahteraan, dan transformasi manajemen ASN berbasis digitalisasi.

"Ini jelas melanggar PP Nomor 20 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil," kata Mimik.

Adapun pasal 40 dalam PP itu diatur tentang bobot penilaian kinerja PNS. Yaitu sebesar 70 persen untuk sasaran kinerja pegawai dan 30 persen untuk perilaku kerja.

Wabup juga menyinggung klarifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dinilainya hanya memverifikasi data, tapi tidak mengetahui detail tahapan pembahasan mutasi di internal TPK. "BKN hanya memastikan data sesuai, tapi prosesnya tidak melalui tahapan sebagaimana mestinya," tambahnya.

Bupati Bantah Ada Pelanggaran

Terpisah, Subandi Bupati Sidoarjo memastikan bahwa mutasi puluhan ASN pada 17 September itu sudah sesuai prosedur. Ia menegaskan, mutasi dan rotasi adalah hal yang wajar dalam sistem birokrasi.

"Mutasi ini sudah sesuai aturan. Mekanismenya memang dari BKN. Kalau ada yang bilang tidak sah, ya ada *stakeholder*-nya. Yang jelas BKN sudah menjawab regulasinya sesuai, jadi tidak ada masalah," kata Subandi di Kantor Kecamatan Waru, Minggu (21/9/2025).

Menurut Bupati Sidoarjo, langkah pergeseran pejabat ASN dilakukan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja birokrasi.

"Mutasi itu bagian dari upaya memperkuat kinerja. Semua sudah sesuai mekanisme yang ada," tegas Subandi. (bil/saf/ham)

